



PENYIMPANGAN SOSIAL SEBAGAI AWAL TINDAK KRIMINAL

SOCIAL DEVIATION AS THE BEGINNING OF CRIMINAL ACTIONS

Mokhmad Anton Hermawan Eka Putra¹, Hadi Yusuf²

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email : antonairbus@gmail.com¹ hoedydjoesof@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 11-05-2025

Revised : 13-05-2025

Accepted : 15-05-2025

Published : 17-05-2025

Abstract

Social deviance refers to behavior that violates the accepted norms and values within a society. In the context of criminology, social deviance can serve as a precursor to criminal acts if not addressed early. This study aims to explain why social deviance occurs, how it develops into criminal behavior, and how such crimes can be prevented through social and legal approaches. The method employed is a literature review with a qualitative descriptive analysis. Based on classical and modern criminological theories, it is found that social deviance is strongly correlated with crime rates, particularly in societies with weak social control. Social deviance often originates from family dysfunction, environmental influences, and failures in the socialization process. Therefore, a deeper understanding of social deviance can assist in designing more effective crime prevention strategies.

Keywords: *Social deviance, criminality, criminology*

Abstrak

Penyimpangan sosial merupakan bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks kriminologi, penyimpangan sosial dapat menjadi cikal bakal dari tindakan kriminal apabila tidak segera ditangani. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa penyimpangan sosial terjadi, bagaimana penyimpangan tersebut berkembang menjadi tindak kriminal, serta bagaimana tindakan kriminal tersebut dapat dicegah melalui pendekatan sosial dan hukum. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan tinjauan teori-teori kriminologi klasik dan modern, ditemukan bahwa penyimpangan sosial berkorelasi kuat dengan tingkat kriminalitas, terutama dalam masyarakat dengan kontrol sosial yang lemah. Penyimpangan sosial sering kali bermula dari masalah keluarga, pengaruh lingkungan, dan kegagalan dalam proses sosialisasi. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai penyimpangan sosial dapat membantu dalam merancang strategi pencegahan kejahatan yang lebih efektif.

Kata kunci: *Penyimpangan sosial, kriminalitas, kriminologi*

PENDAHULUAN

Penyimpangan sosial merupakan fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Perilaku menyimpang terjadi ketika individu atau kelompok tidak mematuhi norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat, baik yang bersifat formal (seperti hukum) maupun informal (seperti adat dan tradisi). Penyimpangan sosial tidak selalu berujung pada tindakan kriminal, namun dalam banyak kasus, perilaku yang dianggap menyimpang tersebut dapat berkembang menjadi tindak pidana. Hal ini sering kali disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakmampuan individu untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang ada, pengaruh lingkungan yang kurang mendukung, serta kegagalan dalam proses sosialisasi.



Seiring dengan meningkatnya jumlah kasus kriminalitas yang terjadi di masyarakat, penting untuk memahami bagaimana penyimpangan sosial dapat bertransformasi menjadi tindak kriminal. Di Indonesia, fenomena seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, kekerasan antar pelajar, dan tindak kejahatan lainnya sering kali berakar pada perilaku menyimpang yang terjadi sejak dini. Dalam banyak kasus, tindakan kriminal yang dilakukan oleh remaja atau kelompok tertentu dimulai dengan penyimpangan sosial yang semakin lama semakin berat, hingga akhirnya berujung pada kejahatan yang meresahkan masyarakat.

Oleh karena itu, penting untuk memahami hubungan antara penyimpangan sosial dan tindak kriminal, serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya transisi dari perilaku menyimpang menuju tindakan kriminal. Penyimpangan sosial, meskipun tidak selalu berujung pada kejahatan, memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi tindak kriminal, terutama jika tidak ada upaya pencegahan yang dilakukan sejak dini. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan perilaku menyimpang, serta memberikan penanganan yang tepat untuk menghindari transisi menuju tindak pidana.

Penyimpangan sosial adalah perilaku individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Perilaku ini dapat berupa pelanggaran terhadap norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, maupun norma kesopanan. Dalam banyak kasus, penyimpangan sosial tidak berhenti pada perilaku menyimpang semata, melainkan berkembang menjadi tindak kriminal yang meresahkan masyarakat.

Contoh nyata dapat dilihat dalam kasus kenakalan remaja seperti membolos sekolah, merokok, pergaulan bebas, atau bergabung dalam geng motor. Perilaku-perilaku ini sering kali dianggap “normal” atau “fase nakal” oleh sebagian masyarakat, padahal secara sosiologis menunjukkan potensi besar berkembang menjadi tindakan kriminal. Ketika penyimpangan ini tidak segera mendapat intervensi dari lingkungan sosial—terutama keluarga, sekolah, dan masyarakat—peluangnya untuk berubah menjadi kejahatan meningkat.

Dalam konteks kriminologi, penyimpangan sosial merupakan fase awal dari proses kriminalisasi. Individu yang terbiasa dengan perilaku menyimpang tanpa mendapatkan konsekuensi negatif, akan membentuk toleransi moral terhadap pelanggaran hukum. Apalagi jika ia hidup di lingkungan yang permisif atau bahkan menormalkan perilaku tersebut. Dari sinilah benih-benih tindak kriminal tumbuh dan berkembang.

Indonesia, sebagai negara dengan keberagaman sosial, menghadapi tantangan serius dalam mengelola penyimpangan sosial. Data kriminalitas menunjukkan bahwa pelaku kejahatan usia muda terus meningkat setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa banyak tindak kriminal berakar dari penyimpangan sosial yang tidak tertangani sejak dini.

Rumusan Masalah

1. Apa hubungan antara penyimpangan sosial dengan tindak kriminal?
2. Mengapa penyimpangan sosial dapat berkembang menjadi tindak pidana?
3. Bagaimana penyimpangan sosial dapat dicegah agar tidak berkembang menjadi kejahatan?



Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya penyimpangan sosial.
2. Mengkaji mekanisme transisi dari perilaku menyimpang menuju tindak pidana.
3. Memberikan alternatif strategi pencegahan kejahatan berbasis pendekatan sosial dan hukum.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Penulis mengkaji berbagai literatur yang relevan, seperti buku *Kriminologi* karya Topo Santoso, jurnal-jurnal ilmiah, artikel akademik, serta dokumen hukum terkait. Fokus analisis adalah menjelaskan hubungan antara penyimpangan sosial dan kriminalitas berdasarkan teori-teori kriminologi klasik maupun modern.

Pendekatan deskriptif-kualitatif memungkinkan penulis untuk menggambarkan secara komprehensif proses transisi dari penyimpangan sosial menuju tindakan kriminal, serta menyusun rekomendasi pencegahan berbasis teori dan konteks sosial masyarakat Indonesia.

Tinjauan Pustaka

1. Teori Penyimpangan Sosial oleh Émile Durkheim

Durkheim dalam karyanya yang terkenal *Le Suicide* (1897) menyatakan bahwa penyimpangan sosial adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial. Bagi Durkheim, penyimpangan tidak selalu memiliki dampak negatif. Penyimpangan sosial bisa berfungsi sebagai bentuk perlawanan terhadap norma-norma sosial yang sudah tidak relevan atau menghambat perkembangan masyarakat. Menurut Durkheim, dalam masyarakat yang berkembang, terdapat dua jenis penyimpangan: penyimpangan yang bersifat sementara (misalnya, individu yang tidak mengikuti norma karena transisi sosial) dan penyimpangan yang menjadi pola perilaku dalam masyarakat. Durkheim juga menyatakan bahwa penyimpangan sosial adalah akibat dari ketidakseimbangan dalam masyarakat, terutama dalam hal struktur sosial dan norma.

Teori penyimpangan sosial menurut Émile Durkheim adalah salah satu fondasi utama dalam sosiologi. Ia memandang penyimpangan sebagai bagian normal dari masyarakat, bukan sebagai anomali yang harus dihilangkan sepenuhnya. Berikut penjelasan lebih lengkap dan detail mengenai teori penyimpangan sosial menurut Durkheim:

Teori Penyimpangan Sosial menurut Émile Durkheim

a. Penyimpangan sebagai Bagian Normal dari Masyarakat

Durkheim berpendapat bahwa penyimpangan adalah hal normal dan tak terhindarkan dalam setiap masyarakat. Bahkan, ia menyatakan bahwa:

"Crime is normal because a society exempt from it is utterly impossible."

Artinya: dalam masyarakat mana pun, pasti akan ada individu atau kelompok yang menyimpang dari norma.



b. Fungsi Penyimpangan dalam Masyarakat

Durkheim menjelaskan bahwa penyimpangan memiliki fungsi positif dalam masyarakat, yaitu:

- 1) Menegaskan norma dan nilai sosial: Setiap kali seseorang melakukan penyimpangan, masyarakat bereaksi (melalui sanksi atau kecaman), dan ini mempertegas nilai-nilai yang dianut masyarakat.
- 2) Mendorong perubahan sosial: Individu yang menyimpang kadang membawa ide-ide baru (misalnya reformis sosial), dan jika diterima, bisa mengarah pada pembaruan norma.
- 3) Meningkatkan solidaritas sosial: Reaksi bersama terhadap pelaku penyimpangan memperkuat rasa "kita" dalam komunitas.

c. Anomie (Ketiadaan Norma)

Konsep sentral dalam teori Durkheim adalah anomie — keadaan di mana norma sosial menjadi lemah, kabur, atau bertentangan, sehingga individu kehilangan pedoman.

Durkheim menyebut anomie terutama terjadi saat:

- 1) Perubahan sosial yang cepat (revolusi, krisis ekonomi)
- 2) Ketimpangan sosial tinggi
- 3) Kegagalan institusi sosial membimbing individu

Dalam konteks anomie, penyimpangan muncul karena individu tidak tahu apa yang diharapkan oleh masyarakat atau tidak mampu memenuhi ekspektasi itu.

d. Penyimpangan dan Integrasi Sosial

Durkheim juga menekankan bahwa terlalu rendah atau terlalu tinggi tingkat integrasi sosial dapat menyebabkan penyimpangan, termasuk dalam bentuk ekstrem seperti bunuh diri. Dalam karyanya *Le Suicide* (1897), ia mengklasifikasikan bunuh diri menjadi beberapa tipe:

- 1) Egoistik – karena kurangnya keterikatan sosial
- 2) Altruistik – karena terlalu kuatnya keterikatan sosial
- 3) Anomik – karena kekacauan norma sosial
- 4) Fatalistik – karena tekanan norma yang terlalu ketat

2. Teori Strain oleh Robert K. Merton

Robert K. Merton mengembangkan teori strain yang menjelaskan bahwa penyimpangan sosial terjadi ketika ada ketidaksesuaian antara tujuan budaya yang ingin dicapai dan cara-cara yang sah untuk mencapainya. Dalam masyarakat, ada tujuan-tujuan tertentu yang dianggap penting oleh budaya dominan, seperti keberhasilan materi atau sosial. Namun, tidak semua individu memiliki akses yang setara terhadap cara yang sah untuk mencapai tujuan tersebut. Akibatnya, beberapa individu mencari alternatif yang lebih mudah dan terkadang menyimpang dari norma, seperti melakukan kejahatan untuk mencapai kekayaan. Merton mengklasifikasikan individu dalam lima tipe respons terhadap strain: konformis, inovator, ritualis, retretis, dan



pemberontak.

Robert K. Merton mengembangkan teori strain dalam karyanya *Social Structure and Anomie* (1938), sebagai lanjutan dari konsep anomie Durkheim. Merton menyoroti bahwa ketegangan sosial terjadi ketika terdapat kesenjangan antara tujuan budaya (cultural goals) dan cara-cara yang diinstitusikan secara sah (legitimate means) untuk mencapainya.

Ketika individu tidak memiliki akses yang setara terhadap cara-cara sah untuk mencapai tujuan yang diakui masyarakat (seperti kekayaan, kesuksesan), maka akan timbul tekanan atau strain yang mendorong mereka melakukan penyimpangan.

a. Unsur Utama dalam Teori Strain

Merton mengidentifikasi dua komponen penting:

- 1) Tujuan budaya (Cultural goals): Nilai atau aspirasi yang dihargai masyarakat, seperti kesuksesan finansial, status sosial tinggi, dll.
- 2) Cara yang dilembagakan (Institutionalized means): Saluran sah yang disetujui masyarakat untuk mencapai tujuan itu, seperti pendidikan, kerja keras, dan kualifikasi formal.

Jika masyarakat lebih menekankan tujuan daripada cara, maka akan ada tekanan yang besar bagi individu untuk mencapai tujuan *dengan cara apa pun*, termasuk yang menyimpang.

b. Lima Tipe Adaptasi Individu terhadap Strain

Merton mengidentifikasi lima respons terhadap ketegangan antara tujuan dan cara, yaitu:

Tipe Adaptasi	Tujuan Budaya (misalnya: sukses)	Cara Sah (misalnya: kerja keras)	Contoh
Konformitas	Terima	Terima	Mayoritas warga masyarakat
Inovasi	Terima	Tolak	Penjahat kerah putih, pengedar narkoba
Ritualisme	Tolak	Terima	Birokrat yang kaku, pekerja tanpa ambisi
Retreatisme	Tolak	Tolak	Pecandu, gelandangan
Pemberontakan	Ganti dengan tujuan baru	Ganti dengan cara baru	Revolusioner, aktivis radikal

3. Teori Labeling oleh Howard Becker

Howard Becker dalam karyanya *Outsiders* (1963) mengemukakan bahwa penyimpangan sosial terjadi ketika individu atau kelompok diberi label oleh masyarakat sebagai "penyimpang". Menurut Becker, proses labeling ini lebih berpengaruh daripada tindakan itu sendiri. Ketika seseorang diberi label sebagai penyimpang, individu tersebut cenderung menerima label tersebut dan menginternalisasi perilaku yang sesuai dengan label tersebut. Proses ini memicu individu untuk terus terlibat dalam tindakan yang dianggap menyimpang, yang pada akhirnya



dapat berujung pada tindakan kriminal. Hal ini juga menjelaskan mengapa individu yang terlibat dalam sistem peradilan pidana sering kali mengulangi perilaku kriminal setelah diberi label sebagai kriminal.

Howard Becker mengembangkan teori labeling dalam bukunya yang terkenal “Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance” (1963). Teori ini merupakan bagian dari pendekatan interaksionisme simbolik, yang menekankan bahwa penyimpangan bukan hanya hasil dari tindakan itu sendiri, tetapi lebih dari reaksi sosial terhadap tindakan tersebut.

“Deviance is not a quality of the act the person commits, but rather a consequence of the application by others of rules and sanctions to an ‘offender’.” — Howard Becker

Artinya, tidak ada tindakan yang secara inheren menyimpang; ia menjadi menyimpang ketika dilabeli demikian oleh masyarakat.

Konsep Utama dalam Teori Labeling

a. Label

Label adalah stigma atau cap sosial yang diberikan kepada individu atau kelompok yang dianggap menyimpang dari norma.

Contoh: Seorang anak dicap “nakal” karena sering terlambat, atau seseorang yang sekali mencuri dicap “kriminal”.

b. Proses Sosial

Becker menekankan bahwa penyimpangan adalah hasil dari interaksi sosial, yaitu:

- 1) Masyarakat membuat aturan (norma)
- 2) Orang tertentu melanggar aturan itu (secara nyata atau dianggap melanggar)
- 3) Kemudian mereka dilabeli sebagai “penyimpang”
- 4) Label ini mempengaruhi identitas dan perilaku selanjutnya

c. Self-Fulfilling Prophecy (Nubuat yang Terpenuhi Sendiri)

Ketika seseorang sudah dilabeli sebagai penyimpang (misalnya “bandit”, “preman”, “narkoba”), maka mereka mungkin akan:

- 1) Dikucilkan dari masyarakat
- 2) Susah mendapat akses kerja/pendidikan
- 3) Akhirnya menginternalisasi label tersebut dan benar-benar berperilaku menyimpang

Contoh: Seorang mantan napi yang terus dicurigai akan kembali mencuri, akhirnya merasa tidak punya pilihan selain kembali mencuri untuk bertahan hidup.

Tipe-Tipe Penyimpangan Menurut Becker

a. Primary deviance (penyimpangan primer)

- 1) Penyimpangan kecil dan pertama kali
- 2) Belum ada label kuat



3) Contoh: bolos sekolah sesekali

b. **Secondary deviance (penyimpangan sekunder)**

1) Terjadi setelah individu mendapat label

2) Label membentuk identitas dan perilaku

3) Contoh: anak yang terus disebut “nakal” lalu masuk geng dan menjadi pelaku kriminal

Peran Agen Sosial

Menurut Becker, kelompok-kelompok yang berkuasa (polisi, guru, media, hukum, dll.) memiliki wewenang untuk memberi label. Label sering kali diberikan berdasarkan kelas sosial, ras, atau kekuasaan, bukan hanya karena tindakan objektif.

Artinya, dua orang bisa melakukan hal yang sama, tapi hanya satu yang dilabeli "kriminal" tergantung siapa dia dan siapa yang menilainya.

Implikasi Sosial

a. Labeling dapat memperkuat penyimpangan.

b. Rehabilitasi menjadi lebih sulit karena masyarakat melihat pelaku sebagai identitas tetap.

c. Menunjukkan bahwa hukum dan norma sosial tidak selalu netral, melainkan mencerminkan kekuasaan dan dominasi kelompok tertentu.

Kritik terhadap Teori Labeling

a. Tidak menjelaskan penyimpangan awal: Mengapa seseorang melakukan tindakan menyimpang pertama kali?

b. Kurang menekankan struktur sosial: Misalnya kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dll.

c. Terlalu fokus pada reaksi sosial, kurang perhatian pada motivasi individu.

Namun demikian, teori ini penting karena menggeser fokus dari “siapa yang menyimpang” ke “siapa yang memberi label dan mengapa”.

4. **Kriminologi Menurut Topo Santoso**

Topo Santoso adalah pakar hukum pidana dan kriminologi Indonesia, guru besar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), dan penulis berbagai buku hukum yang menjadi rujukan akademik dan praktisi hukum. Ia juga dikenal sebagai akademisi yang menjembatani teori kriminologi klasik dan modern dengan konteks sosial Indonesia.

Topo Santoso dalam bukunya *Kriminologi* menjelaskan bahwa untuk memahami kriminologi, kita harus melihatnya dari berbagai dimensi, termasuk sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Menurut Santoso, penyimpangan sosial sering kali merupakan cikal bakal dari tindak kriminalitas. Ia menekankan pentingnya melihat faktor-faktor struktural yang berkontribusi terhadap penyimpangan sosial, seperti ketidakadilan sosial, kesenjangan ekonomi, serta kelemahan dalam kontrol sosial yang ada di masyarakat. Dalam pandangan Santoso, kriminologi harus menjadi ilmu yang holistik dan interdisipliner, yang tidak hanya mempelajari faktor individu, tetapi juga faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang turut berperan



dalam membentuk perilaku kriminal.

Topo Santoso mendefinisikan kriminologi sebagai:

“Ilmu yang mempelajari kejahatan secara ilmiah, baik mengenai sebab-sebab kejahatan, pelaku kejahatan, korban, reaksi masyarakat, hingga penanggulangan kejahatan itu sendiri.”

Kriminologi bukan hanya mempelajari tindak pidana (crime) secara hukum, tetapi juga memandangnya sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor: ekonomi, budaya, politik, dan institusi.

Ruang Lingkup Kriminologi versi Topo Santoso

Topo membagi ruang lingkup kriminologi menjadi lima bidang utama:

a. Etiologi Kriminal (sebab-sebab kejahatan)

- 1) Mengkaji mengapa seseorang melakukan kejahatan, termasuk teori biologis, psikologis, sosiologis, dan struktural.
- 2) Misalnya: faktor kemiskinan, ketimpangan, pelabelan, atau ketidakseimbangan kekuasaan.

b. Kriminalitas (Crime)

- 1) Menganalisis jenis-jenis kejahatan (konvensional dan kontemporer).
- 2) Tidak hanya kejahatan jalanan, tetapi juga white-collar crime, cybercrime, dan korupsi.

c. Pelaku Kejahatan (Criminal)

- 1) Mengkaji karakteristik, latar belakang, dan perilaku pelaku.
- 2) Bisa dilihat dari aspek individu (psikologi) maupun konteks sosialnya.

d. Korban (Victimology)

- 1) Menyoroti peran dan kondisi korban, termasuk siapa yang lebih rentan menjadi korban dan bagaimana perlindungan korban.
- 2) Topo mendukung integrasi victimology ke dalam kebijakan peradilan pidana.

e. Reaksi Sosial terhadap Kejahatan

- 1) Meliputi cara masyarakat dan institusi merespons kejahatan: polisi, hukum, media, dan publik.
- 2) Termasuk studi tentang penegakan hukum yang diskriminatif, abuse of power, dan efektivitas sistem peradilan pidana.



Pendekatan Kriminologi

Topo Santoso menjelaskan bahwa kriminologi dapat didekati dari berbagai pendekatan:

Pendekatan	Fokus
Positivistik	Menekankan faktor internal/eksternal yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan
Sosiologis/Kritis	Melihat kejahatan sebagai konstruksi sosial dan produk ketimpangan kekuasaan
Interaksionis	Meneliti bagaimana pelabelan dan interaksi membentuk identitas menyimpang
Feministik	Menyoroti bagaimana sistem hukum dan sosial mendiskriminasi perempuan sebagai korban atau pelaku

5. Penyimpangan Primer dan Sekunder

Menurut Edwin M. Lemert, seorang tokoh penting dalam pendekatan interaksionisme simbolik dalam kriminologi, penyimpangan sosial dapat dibagi menjadi dua bentuk utama, yaitu penyimpangan primer (primary deviance) dan penyimpangan sekunder (secondary deviance). Klasifikasi ini memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana proses penyimpangan terjadi dalam kehidupan sosial individu, khususnya bagaimana reaksi masyarakat berperan dalam memperkuat atau memperlemah perilaku menyimpang tersebut.

a. Penyimpangan Primer

Penyimpangan primer adalah jenis penyimpangan yang terjadi ketika seseorang melakukan tindakan menyimpang untuk pertama kalinya, atau dalam bentuk pelanggaran kecil yang bersifat sporadis dan belum memengaruhi identitas diri seseorang secara permanen. Contohnya bisa berupa berbohong kepada orang tua, mencuri barang kecil saat masih anak-anak, atau melanggar aturan sekolah seperti bolos. Tindakan-tindakan ini sering kali tidak disertai dengan label sosial yang serius, dan masyarakat cenderung memaafkan atau mengabaikannya sebagai kesalahan yang wajar, terutama jika dilakukan oleh anak-anak atau remaja.

Ciri utama penyimpangan primer adalah bahwa pelaku tidak melihat dirinya sebagai penyimpang dan masyarakat pun belum menempatkan individu tersebut dalam kategori penyimpang. Dengan kata lain, penyimpangan primer belum mengganggu status sosial atau citra diri pelaku secara signifikan. Dalam banyak kasus, individu masih bisa kembali ke peran sosial yang diterima secara umum tanpa hambatan besar.

b. Penyimpangan Sekunder

Sebaliknya, penyimpangan sekunder adalah bentuk penyimpangan yang muncul setelah individu menerima dan menginternalisasi label sebagai “penyimpang” yang diberikan oleh masyarakat atau otoritas sosial. Ketika individu mendapatkan label seperti “nakal”, “penjahat”, “pemabuk”, atau “pencuri”, hal itu dapat mengubah cara pandang masyarakat terhadap dirinya, dan secara bertahap, juga mengubah cara pandang individu terhadap dirinya



sendiri. Akibatnya, individu mulai mengidentifikasi diri dengan label tersebut dan bertindak sesuai dengan peran yang diasosiasikan dengan label itu.

Lemert menekankan bahwa penyimpangan sekunder lebih berbahaya karena sering kali menjadi awal dari karier kriminal atau penyimpangan yang berkelanjutan. Label sosial yang melekat pada individu menyebabkan stigma sosial, yaitu pandangan negatif, diskriminasi, dan pengucilan (eksklusi sosial) dari komunitasnya. Individu yang dijauhi, dikucilkan, atau tidak diberikan kesempatan untuk kembali ke masyarakat secara normal, akhirnya merasa tidak punya tempat selain kelompok yang menyimpang

— seperti geng, komunitas jalanan, atau kelompok kriminal. Di sinilah penyimpangan berubah dari tindakan sesaat menjadi identitas sosial permanen.

Kontrol Sosial dan Pengaruhnya terhadap Penyimpangan

Teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi menekankan bahwa individu yang memiliki ikatan sosial yang kuat dengan keluarga, sekolah, dan masyarakat cenderung tidak melakukan penyimpangan. Hirschi berargumen bahwa ikatan sosial yang kuat ini mencegah individu untuk terlibat dalam perilaku kriminal. Dalam konteks ini, penyimpangan sosial terjadi karena lemahnya kontrol sosial yang ada, baik itu kontrol formal (hukum dan kebijakan) maupun kontrol informal (ikatan sosial dalam keluarga dan komunitas). Ketika individu tidak merasa terikat dengan masyarakat atau kelompok sosialnya, mereka lebih cenderung untuk melakukan penyimpangan.

Pembahasan

1. Mengapa Terjadi Penyimpangan Sosial

a. Faktor Sosial

- 1) **Keluarga:** Struktur keluarga yang tidak harmonis, perceraian, atau kekerasan dalam rumah tangga dapat memicu individu untuk mencari penerimaan dari lingkungan luar, termasuk kelompok yang menyimpang.
 - 2) **Teman Sebaya:** Remaja sangat rentan dipengaruhi oleh teman sebaya. Kelompok pertemanan yang menyimpang dapat menjadi sarana awal mengenalkan perilaku menyimpang.
 - 3) **Kemiskinan:** Ketimpangan sosial dan ekonomi menyebabkan frustrasi struktural. Individu yang tidak memiliki akses ke pendidikan atau pekerjaan layak lebih mudah tergoda untuk melanggar norma demi bertahan hidup.
- b. **Kegagalan Sosialisasi dan Kontrol Sosial** Individu yang tidak berhasil menjalani proses sosialisasi dengan baik cenderung tidak memiliki komitmen terhadap norma masyarakat. Kontrol sosial dari institusi seperti keluarga, sekolah, dan komunitas sangat menentukan perilaku individu.
- c. **Lingkungan Permisif terhadap Penyimpangan** Lingkungan yang mentoleransi penyimpangan, atau bahkan menganggapnya sebagai hal biasa, cenderung melahirkan individu yang tidak merasa bersalah melakukan pelanggaran norma. Contohnya adalah lingkungan tempat tinggal dengan tingkat kriminalitas tinggi atau lemahnya penegakan



hukum.

2. Bagaimana Terjadi Transisi dari Penyimpangan ke Kejahatan

- a. **Proses Bertahap** Perilaku menyimpang sering kali dimulai dari hal kecil seperti membolos sekolah, mencuri barang kecil, atau berbohong. Ketika tidak ada sanksi tegas, perilaku ini berulang dan berkembang menjadi tindakan kriminal yang lebih serius.
- b. **Pembiasaan dan Penguatan Negatif** Ketika individu merasa tidak mendapatkan konsekuensi dari penyimpangan, ia akan merasa bebas dan terbiasa. Hal ini membuat penyimpangan menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan.
- c. **Peran Kelompok dan Tekanan Sosial (Peer Pressure)** Dalam kelompok seperti geng motor atau kelompok jalanan, tekanan untuk loyal terhadap kelompok sering kali diwujudkan dalam tindakan melawan norma sosial, bahkan hukum.
- d. **Studi Kasus Geng Motor** Awalnya hanya sekadar komunitas bermotor, namun seiring berjalannya waktu dan minimnya kegiatan positif, mereka mulai melakukan kekerasan, pemalakan, hingga pembunuhan. Contoh seperti ini menunjukkan bagaimana penyimpangan sosial yang tidak diarahkan bisa berujung pada kejahatan.
- e. **Anak Jalanan dan Penyimpangan** Anak jalanan sering hidup tanpa pengawasan orang tua, tanpa pendidikan, dan tanpa kontrol sosial. Banyak dari mereka terlibat pencurian, perkelahian, atau penyalahgunaan zat. Lingkungan keras dan kebutuhan bertahan hidup memaksa mereka melakukan tindak kriminal.

3. Bagaimana Penyimpangan Tidak Berkembang Menjadi Kejahatan

- a. **Pendidikan Moral dan Karakter Sejak Dini** Penanaman nilai moral dan etika dalam pendidikan formal dan nonformal membantu individu membentuk kepribadian yang patuh norma dan hukum.
- b. **Pembinaan Keluarga** Keluarga yang harmonis, perhatian, dan berfungsi secara efektif adalah benteng pertama pencegahan penyimpangan. Pendidikan karakter sebaiknya dimulai dari rumah.
- c. **Kontrol Sosial Informal** Masyarakat yang aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan saling peduli akan mampu menekan potensi penyimpangan. Forum RT, posyandu remaja, dan karang taruna bisa dijadikan sarana pengawasan sosial.
- d. **Intervensi Sosial dan Program Rehabilitasi** Pemerintah perlu menjalankan program yang menasar remaja bermasalah, seperti bimbingan konseling, pelatihan kerja, dan pusat rehabilitasi sosial agar mereka tidak terjerumus lebih dalam ke dunia kriminal.
- e. **Kebijakan Hukum dan Sosial yang Proaktif** Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia harus diimplementasikan secara maksimal agar anak-anak yang menyimpang tidak dipidana secara represif, tetapi dibina agar kembali ke jalur sosial yang benar.

KESIMPULAN

Penyimpangan sosial dapat berfungsi sebagai titik awal dari terjadinya tindak kriminal,



terutama apabila tidak mendapatkan perhatian yang tepat dari masyarakat dan pihak berwenang. Faktor-faktor seperti kegagalan dalam sosialisasi, lingkungan yang permisif terhadap perilaku menyimpang, serta lemahnya kontrol sosial berperan besar dalam proses transisi dari penyimpangan sosial ke tindak pidana. Dalam banyak kasus, penyimpangan yang dianggap sepele, seperti pelanggaran norma kecil, dapat berkembang menjadi kejahatan yang lebih serius, terutama ketika individu terjebak dalam kelompok yang mendukung perilaku menyimpang.

Namun demikian, penyimpangan sosial tidak selalu berujung pada tindak kriminal. Pencegahan yang efektif, yang melibatkan pendidikan karakter, peran aktif keluarga, serta kebijakan sosial dan hukum yang mendukung rehabilitasi sosial, dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya kejahatan. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya kontrol sosial informal, serta memastikan adanya fasilitas yang mendukung proses sosialisasi yang positif bagi individu sejak dini.

Dengan demikian, untuk mengurangi laju kriminalitas yang berawal dari penyimpangan sosial, pendekatan pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Pembangunan karakter dan penguatan nilai-nilai moral dalam keluarga serta pendidikan harus menjadi prioritas utama untuk menciptakan individu yang bertanggung jawab dan tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan sosial yang negatif.

Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat program pencegahan dengan melibatkan lembaga pendidikan dalam memberikan pemahaman terkait nilai-nilai sosial dan moral yang benar.
2. Diperlukan upaya peningkatan kualitas pengasuhan dalam keluarga untuk mengurangi potensi terjadinya penyimpangan sosial.
3. Masyarakat harus lebih aktif dalam menciptakan kontrol sosial informal yang positif untuk mencegah penyimpangan berkembang menjadi tindak kriminal.

DAFTAR PUSTAKA

- Artikulo, I. A., & Nugroho, B. (2021). "Analisis Kriminologi terhadap Kejahatan Jalanan oleh Remaja." *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, 9(2), 56–70.
- Becker, Howard. *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*. New York: Free Press, 1963.
- Bonger, Willem A. *Criminality and Economic Conditions*. Boston: Little, Brown, and Company, 1916.
- Hirschi, Travis. *Causes of Delinquency*. University of California Press, 1969.
- Jurnal Kriminologi Indonesia, berbagai edisi.
- Merton, Robert K. *Social Theory and Social Structure*. New York: Free Press, 1968.
- Santoso, Topo. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Yusuf, R. (2020). "Pencegahan Tindak Kriminal Melalui Pendidikan Karakter." *Jurnal Pendidikan Sosial*, 5(1), 34–45.